

**DAMPAK PELAKSANAAN *LAND OFFICE COMPUTERIZATION (LOC)*
TERHADAP PROSES KERJA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



Disusun oleh:

**BUDI RAHMAN
NIM. 2091659/M**

INTISARI

Tuntutan jaman dan perkembangan teknologi komputer telah mendorong Badan Pertanahan Nasional untuk menerapkan komputerisasi di lembaga tersebut sejak tahun 1997. Proyek ini dinamakan dengan *Land Office Computerization* (LOC). Penerapan teknologi baru di dalam suatu organisasi akan menimbulkan dampak tertentu terhadap organisasi tersebut. Salah satunya adalah dampak terhadap proses kerja. Didasarkan atas hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dampak apakah yang muncul terhadap proses kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setelah diaplikasikannya LOC.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data digunakan metode wawancara, pengamatan, studi dokumentasi, dan catatan lapangan. Informasi utama berasal dari administrator dan pejabat struktural. Informasi selanjutnya berasal dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, baik yang terlibat sebagai petugas LOC maupun bukan petugas LOC.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa pelaksanaan LOC memberikan dukungan dalam proses pengambilan keputusan berupa kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Hal ini disebabkan karena kemampuan teknologi komputer yang diterapkan dapat menyediakan *data base* dan aplikasi yang mempermudah proses pengetikan dan penyuntingan. Namun, tingkat kepercayaan data masih meragukan disebabkan adanya prosedur entri data dan pengolahan data yang tidak dipatuhi. Kedua, pelaksanaan LOC meningkatkan jumlah pegawai di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah karena adanya kebutuhan terhadap petugas LOC. Ketiga, pelaksanaan LOC berdampak kepada bertambahnya sarana yang dapat digunakan untuk berkoordinasi. Keempat, munculnya ancaman baru terhadap kesehatan petugas dalam jangka panjang. Kelima, pelaksanaan LOC tidak merubah status kerja dari posisi-posisi yang ada di kantor. Perubahan terjadi hanya karena ada posisi yang baru yaitu administrator. Keenam, dengan dilaksanakannya LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merubah bentuk sebagian kegiatan pelayanan pertanahan, dari kegiatan manual menjadi bentuk kegiatan yang terkomputerisasi. Ketujuh, pada umumnya pegawai memberi arti yang positif terhadap pelaksanaan LOC berupa sikap mendukung terhadap pelaksanaan LOC. Pemaknaan yang sederhana dari pegawai adalah LOC lebih memudahkan dan lebih mempercepat pekerjaan. Namun, sikap yang mendukung tersebut ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya kesadaran pegawai untuk meningkatkan kemampuan komputernya. Kedelapan, pelaksanaan LOC telah mengurangi kontribusi fisik pegawai terhadap

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Kerangka Pemikiran	18
C. Anggapan Dasar	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Metode Penelitian	21
B. Model Pendekatan Penelitian	21
C. Metode/Teknik Pengumpulan Data	22
1. Wawancara	22
2. Pengamatan	23
3. Studi dokumentasi	23
4. Catatan lapangan	23

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	26
B. Struktur Organisasi	27
C. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	30
1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan ...	30
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	31
D. Sarana dan Prasarana	32
1. Prasarana Fisik	32
2. Perlengkapan dan Mesin-mesin	33
E. Perkembangan Komputerisasi	34
1. Sebelum Tahun 1996	34
2. Tahun 1996-1998	35
3. Tahun 1996 sampai sekarang	35

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengambilan Keputusan	38
B. Rentang Kendali	43
C. Koordinasi Antara Beberapa Kegiatan	45
D. Keamanan Kerja	47
1. Keamanan dan Kesehatan Petugas	47
2. Keamanan Data dan Sistem	49
E. Status Pekerjaan	51
F. Isi Pekerjaan	53
G. Pemaknaan Terhadap Pekerjaan	59
H. Kebutuhan Yang Bersifat Fisik	60

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Guna mengantisipasi kecepatan dan keakuratan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, BPN membentuk proyek komputerisasi yang disebut *Land Office Computerization (LOC)*. Proyek phase I dimulai sejak tahun 1997 sampai dengan bulan Maret 1999 yang mendapat bantuan/pinjaman dari Pemerintah Spanyol. Pelaksana utama dari proyek ini ialah konsultan dari Spanyol yaitu CIMSA Ingenieria A.I.E. LOC diselenggarakan sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya tuntutan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat saat ini yang berpengaruh pada kebutuhan dan keharusan mempergunakan komputer pada perusahaan dan kantor-kantor pemerintah di Indonesia. LOC diarahkan untuk mempercepat proses/operasional pelayanan di bidang pertanahan maupun memberikan informasi pertanahan, pengendalian atau monitoring proses pelayanan.

Komputerisasi merupakan sebuah usaha yang diharapkan dapat menggantikan cara manual dengan kualitas kinerja yang lebih

dapat menghasilkan informasi yang terintegrasi, konsisten dengan pengelolaan data yang lebih baik secara nasional, mulai dari BPN pusat ke kantor wilayah BPN di tingkat propinsi, maupun ke kantor pertanahan di tingkat kabupaten/kotamadya. Disamping untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik di lingkungan BPN sendiri, komputerasi kantor pertanahan diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penerapan teknologi baru di dalam suatu organisasi akan memberikan pengaruh terhadap organisasi yang menerapkannya. Alo Liliweri (2002: 376) menyatakan, bahwa "Setiap inovasi teknologi ke dalam organisasi dapat berdampak positif atau negatif atau juga netral terhadap pola-pola relasi sosial atau fungsional antarmanusia". Contohnya seperti yang dikemukakan oleh Edi Purwono (2002: 32) bahwa "Penyelenggaraan komputerasi di sebuah kantor acapkali dinilai akan menyebabkan terjadinya pengangguran atau perubahan dalam organisasi". Orang umumnya akan menolak terjadinya perubahan jika mengira bahwa perubahan itu akan merugikan dirinya. Jika melihat kondisi kantor pertanahan sebagai sebuah instansi pemerintah, pemutusan hubungan kerja karena adanya LOC kemungkinannya sulit untuk dilakukan. Namun, pengurangan isi

Sutaryono dan Suharno (2002: 79) mengemukakan struktur kelembagaan di kantor pertanahan menjadi sebuah dualisme yang sangat mengganggu bagi terwujudnya tujuan penerapan LOC. Di satu sisi sesuai dengan hirarkhi birokrasi di kantor pertanahan, pertanggung jawaban pekerjaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pelaksana sampai dengan kepala kantor pertanahan. Di lain pihak, menurut kelembagaan LOC, seorang administrator (admin) yang langsung bertanggungjawab langsung kepada kepala kantor pertanahan menjadi salah satu ketidakharmisan hubungan antar pegawai atau pejabat di lingkungan kantor pertanahan. Seorang administrator yang non eselon pada jabatan struktural, terkadang harus melewati kepala sub seksi atau kepala seksi untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya langsung kepada kepala kantor pertanahan. Dari contoh diatas nampak bahwa faktor manusia sangat menentukan dalam pengelolaan proyek LOC. Sebaik apa pun perencanaan dan teknologi yang diterapkan, namun akhirnya akan tergantung juga kepada bagaimana manusia menjalankan proyek tersebut.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah salah satu kantor pertanahan tempat dilaksanakannya proyek komputerisasi kantor pertanahan. Sebagai salah satu kantor pertanahan tempat dilaksanakannya proyek LOC akan muncul dampak, baik itu positif

yang muncul adalah dampak negatif. Apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengganggu kepada pelaksanaan LOC itu sendiri, dan lebih lanjut dapat mengganggu kepada pelayanan pertanahan di kantor pertanahan. Agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh dampak pelaksanaan komputerisasi dapat diketahui sehingga dapat ditentukan cara penanganannya, maka perlu dilakukan penelitian-penelitian mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang mengevaluasi dampak pelaksanaan LOC terhadap proses kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dengan judul: "**Dampak Pelaksanaan *Land Office Computerization* Terhadap Proses Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**".

B. Perumusan masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, maka penyusun merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : "Dampak apakah yang muncul terhadap proses kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setelah diaplikasikan komputerisasi kantor pertanahan (LOC)?".

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang muncul terhadap proses kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setelah pelaksanaan *Land Office Computerization (LOC)*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan :

- a. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk kelanjutan pengembangan sistem komputerisasi kantor pertanahan ditinjau dari dampak yang muncul terhadap proses kerja di kantor pertanahan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional dalam menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan proyek LOC dimasa yang akan datang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dampak pelaksanaan LOC terhadap proses kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, adalah:

1. Pelaksanaan LOC memberikan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan berupa ketersediaan, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data.
2. Pelaksanaan LOC meningkatkan jumlah pegawai di Seksi P dan PT karena adanya kebutuhan terhadap petugas LOC.
3. Pelaksanaan LOC berdampak kepada bertambahnya sarana yang dapat digunakan untuk berkoordinasi. Aplikasi-aplikasi yang ada dalam proyek LOC memudahkan pegawai untuk melakukan koordinasi.
4. Munculnya ancaman baru terhadap kesehatan petugas dalam jangka panjang. Keselamatan kerja bagi petugas kurang mendapat perhatian dari pihak pimpinan kantor.
5. Pelaksanaan LOC tidak merubah status kerja dari posisi-posisi yang ada di kantor. Perubahan terjadi hanya karena ada posisi yang baru yaitu administrator.

6. Dengan dilaksanakannya LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merubah bentuk sebagian pekerjaan, dari kegiatan manual menjadi bentuk kegiatan yang terkomputerisasi.
7. Pada umumnya pegawai memberi arti yang positif terhadap pelaksanaan LOC berupa sikap mendukung terhadap pelaksanaan LOC.
8. Pelaksanaan LOC telah mengurangi kontribusi fisik pegawai terhadap pekerjaan. Berkurangnya kontribusi fisik ini disebabkan karena adanya penyederhanaan prosedur.

B. Saran

1. Perlu adanya konsistensi dalam penerapan peraturan dalam pemetaan bidang-bidang tanah sehingga kelebihan yang dimiliki oleh komputer dalam kecepatan dan keakuratan data dapat dimanfaatkan dengan optimal.
2. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada semua pegawai sehingga dukungan pegawai terhadap pelaksanaan LOC meningkat.
3. Perlu dipikirkan penghargaan dan insentif yang memadai bagi para petugas LOC.
4. Perlu dipikirkan pemberian kewenangan pengaturan kepegawaian

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (1999). Reformasi BPN Dalam Pelayanan, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Data Elektronik dan Operator Loker. Badan Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Jakarta.
- _____. (2002). General Overview. Badan Pertanahan Nasional, PT. Jasindo Abadi Utama, Cimsa Ig. AIE. Jakarta.
- Anwar, Muhammad Arsyad, Basri, Faisal H., dan Ikhsan, Muhammad. (1995). Sumberdaya, Teknologi dan Pembangunan (Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Arif, Mirrian Sofyan. (1986). Buku Materi Pokok Organisasi dan Manajemen. Penerbit Karunika. Jakarta.
- Davis, K. (1979). Human Behavior At Work (Organizational Behavior). Tata McGraw Hill Publishing Company Ltd. New Delhi.
- Hastuti, Sri Widiya. (2003). Evaluasi Pelaksanaan Land Office Computerization Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, DIV Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Hicks, Herbert G., dan C. Ray Gullet. (1984). Organization : Theory and Behavior. McGraw Hill Publishing Company Ltd. Singapore.
- Koentjaraningrat. (1990). Metode-metode Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Kumorotomo, Wahyudi, dan Margono. S.A. (1998). Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Liliweri, Alo. (1997) Sosiologi Organisasi. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mapandin, Abraham B. (2003) Modul Mata Kuliah Perundang-undangan Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Moekijat. (2002). Tata Laksana Kantor Manajemen Perkantoran. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy Johannes. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi, Hadari. (1993). Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purwono, Edi. (2002). Apa Yang Harus Diketahui Oleh Sistem Analisis. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Sastrodiningrat, Soebagio. (1986). Materi Pokok Perilaku Administrasi I. Penerbit Karunika. Jakarta.
- Sutaryono dan Suharno. (2002). Pelaksanaan Land Office Computerization (LOC) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Jurnal Pertanahan Nomor 3 Tahun 2. h. 79.
- Walgito, Bimo. (1991). Psikologi Sosial (Suatu Pengantar). Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.

Peraturan – peraturan:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah BPN di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan Serta Sub Seksi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Madya.

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 295.4/0600 tentang Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.